



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 61 /PMK.07/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dana Insentif Daerah, yang selanjutnya disingkat DID, adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah berprestasi yang memenuhi Kriteria Utama, Kriteria Kinerja, dan Batas Minimum Kelulusan Kinerja sebagai dasar untuk menentukan daerah penerima alokasi DID dan penghitungan besaran alokasi DID.
4. Kriteria Utama adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah penerima, meliputi daerah yang sekurang-kurangnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerahnya dan daerah yang menetapkan Peraturan Daerah APBD secara tepat waktu.
5. Kriteria Kinerja adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, terdiri dari Kriteria Kinerja Keuangan, Kriteria Kinerja Pendidikan, dan Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan.
6. Kriteria Kinerja Keuangan adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, meliputi daerah yang mampu meningkatkan atau mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, daerah yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, dan daerah yang mencapai kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas rata-rata nasional.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Kriteria Kinerja Pendidikan adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, meliputi daerah yang mampu mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan sederajatnya di atas rata-rata nasional dan/atau daerah yang mampu mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya di atas rata-rata nasional, dan daerah yang mampu mengurangi jarak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap IPM ideal (100) di atas rata-rata nasional.
8. Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, meliputi daerah yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat pengangguran di atas rata-rata pengurangan tingkat pengangguran nasional, dan daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal Daerah terhadap IPM-nya di atas atau di bawah rata-rata nasional.
9. Batas Minimum Kelulusan Kinerja adalah nilai minimum tertentu atas hasil pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian dari Kriteria Kinerja Keuangan, Kriteria Kinerja Pendidikan, serta Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan.

Pasal 2

Tujuan utama dialokasikannya DID kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah untuk mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan mendorong agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD secara tepat waktu.

BAB II

ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 3

- (1) Alokasi DID Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Proporsi DID untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
 - a. untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penentuan daerah berprestasi dan penghitungan besaran alokasi DID berdasarkan Kriteria Utama, Kriteria Kinerja, dan Batas Minimum Kelulusan Kinerja.
- (4) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat.
- (5) Pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengalokasian belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (6) Rincian daerah penerima DID dan besaran alokasi DID adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011 dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011.

BAB III

PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 5

- (1) Penggunaan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang dicantumkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 yang menjadi kewenangan/urusan daerah, dengan jenis belanja sebagai berikut:
 - a. belanja modal;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja pegawai;
 - d. belanja bantuan keuangan; dan
 - e. belanja hibah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Rincian untuk tiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam penghitungan alokasi belanja anggaran pendidikan yang ditetapkan paling kurang 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DID meliputi:

- a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- c. pendidikan kedinasan; dan
- d. hibah kepada perusahaan daerah.

BAB IV

PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara sekaligus.
- (2) Penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011, Surat Pernyataan, dan Rencana Penggunaan Dana Insentif Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Format Rencana Penggunaan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB V

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan DID dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB VI.
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BUREAU T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904261984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 61 /PMK.07/2011 TENTANG
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM
PENGUNAAN DANA INSENTIF
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Sumatera Selatan	24.250.923.000
2	Provinsi Jawa Tengah	27.209.938.000
3	Provinsi Jawa Timur	28.360.352.000
4	Provinsi Kalimantan Selatan	25.124.038.000
5	Provinsi Sulawesi Utara	33.834.749.000
6	Kab. Aceh Tengah	24.786.539.000
7	Kab. Aceh Tenggara	18.469.095.000
8	Kota Banda Aceh	23.972.981.000
9	Kab. Tapanuli Utara	19.718.112.000
10	Kota Padang Sidempuan	24.386.440.000
11	Kab. Pasaman	23.951.213.000
12	Kota Solok	18.995.277.000
13	Kota Pekanbaru	18.477.347.000
14	Kota Lubuk Linggau	19.062.439.000
15	Kota Cilegon	21.090.361.000
16	Kota Tangerang	28.853.239.000
17	Kab. Banjarnegara	18.262.556.000
18	Kab. Banyumas	22.140.130.000
19	Kab. Batang	23.261.774.000
20	Kab. Cilacap	23.568.026.000
21	Kab. Pemasang	22.908.673.000
22	Kab. Purbalingga	27.795.381.000
23	Kab. Bantul	19.352.813.000
24	Kab. Kulon Progo	19.703.345.000
25	Kab. Jember	19.305.500.000
26	Kab. Jombang	18.575.039.000
27	Kab. Lamongan	21.382.474.000
28	Kab. Pacitan	19.034.261.000
29	Kab. Malinau	31.202.795.000
30	Kota Tarakan	20.530.875.000
31	Kab. Minahasa	20.992.810.000
32	Kota Bitung	20.195.330.000
33	Kota Kotamobagu	27.014.094.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
34	Kab. Bolaang Mongondow Utara	23.511.337.000
35	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	22.525.788.000
36	Kab. Gorontalo	29.077.009.000
37	Kota Gorontalo	21.961.784.000
38	Kab. Pohuwato	19.606.569.000
39	Kab. Bone Bolango	31.461.721.000
40	Kab. Gorontalo Utara	22.723.065.000
41	Kab. Banggai	24.465.541.000
42	Kab. Poso	22.397.465.000
43	Kab. Barru	22.501.381.000
44	Kab. Bone	25.758.666.000
45	Kab. Enrekang	24.422.275.000
46	Kab. Luwu	24.704.861.000
47	Kab. Luwu Utara	24.137.281.000
48	Kab. Pangkajene Kepulauan	22.923.331.000
49	Kab. Pinrang	21.100.219.000
50	Kab. Sidenreng Rappang	20.808.903.000
51	Kota Pare-pare	20.035.361.000
52	Kota Makassar	18.927.274.000
53	Kab. Buton	21.759.847.000
54	Kota Kendari	25.023.445.000
55	Kab. Tabanan	19.391.062.000
56	Kota Denpasar	27.118.977.000
57	Kota Tidore Kepulauan	20.984.054.000
58	Kab. Jayapura	23.785.158.000
59	Kota Jayapura	26.192.444.000
60	Kab. Asmat	24.726.263.000
	Total Provinsi	138.780.000.000
	Total Kab/ Kota	1.249.020.000.000
	Total Nasional	1.387.800.000.000

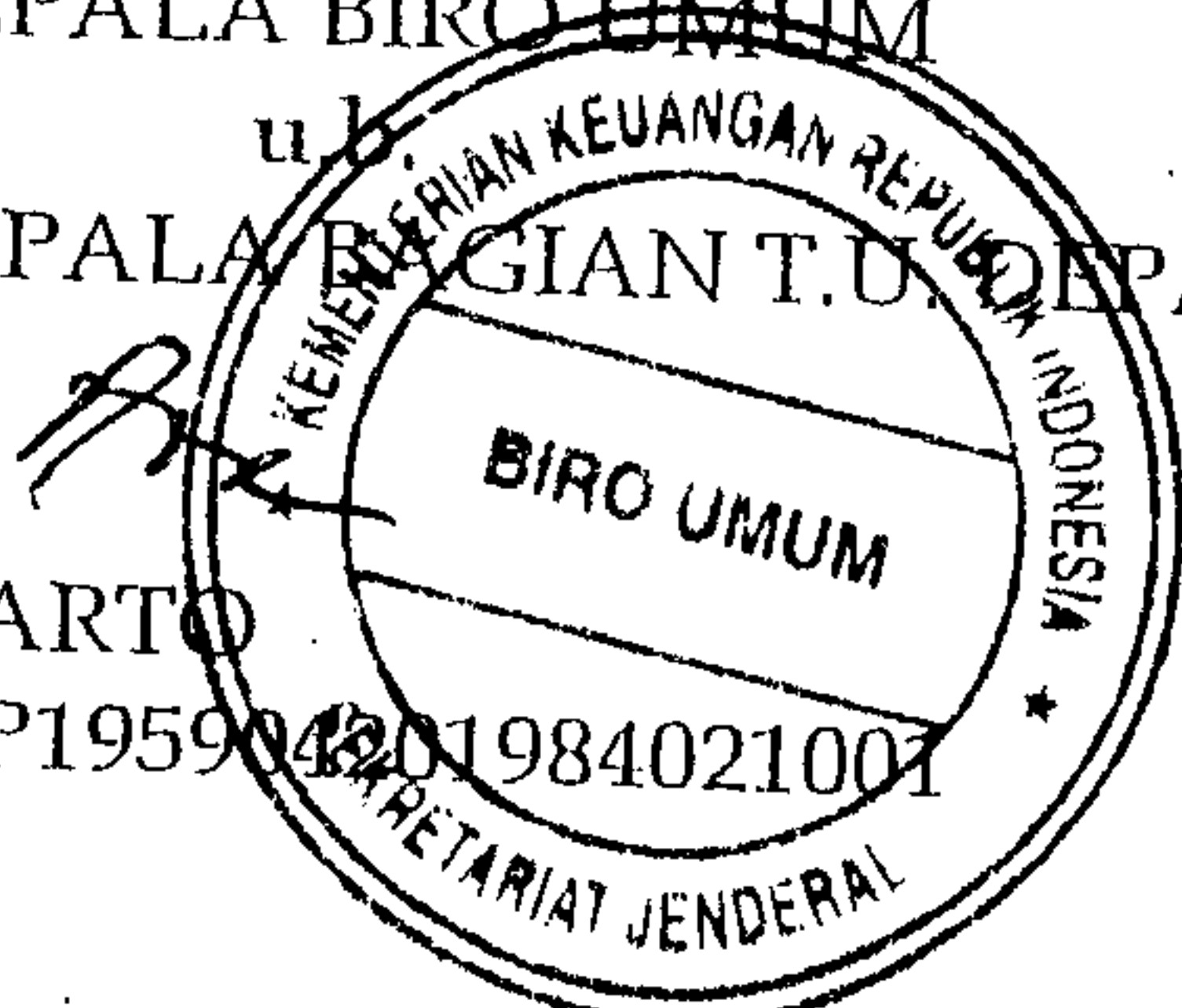
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BUREAU GIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 61 /PMK.07/2011 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
DANA INSENTIF DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota*) menyatakan telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011 dalam APBD dan /atau akan mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011 dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(cap dan tanda tangan)
(materai Rp6000,-)

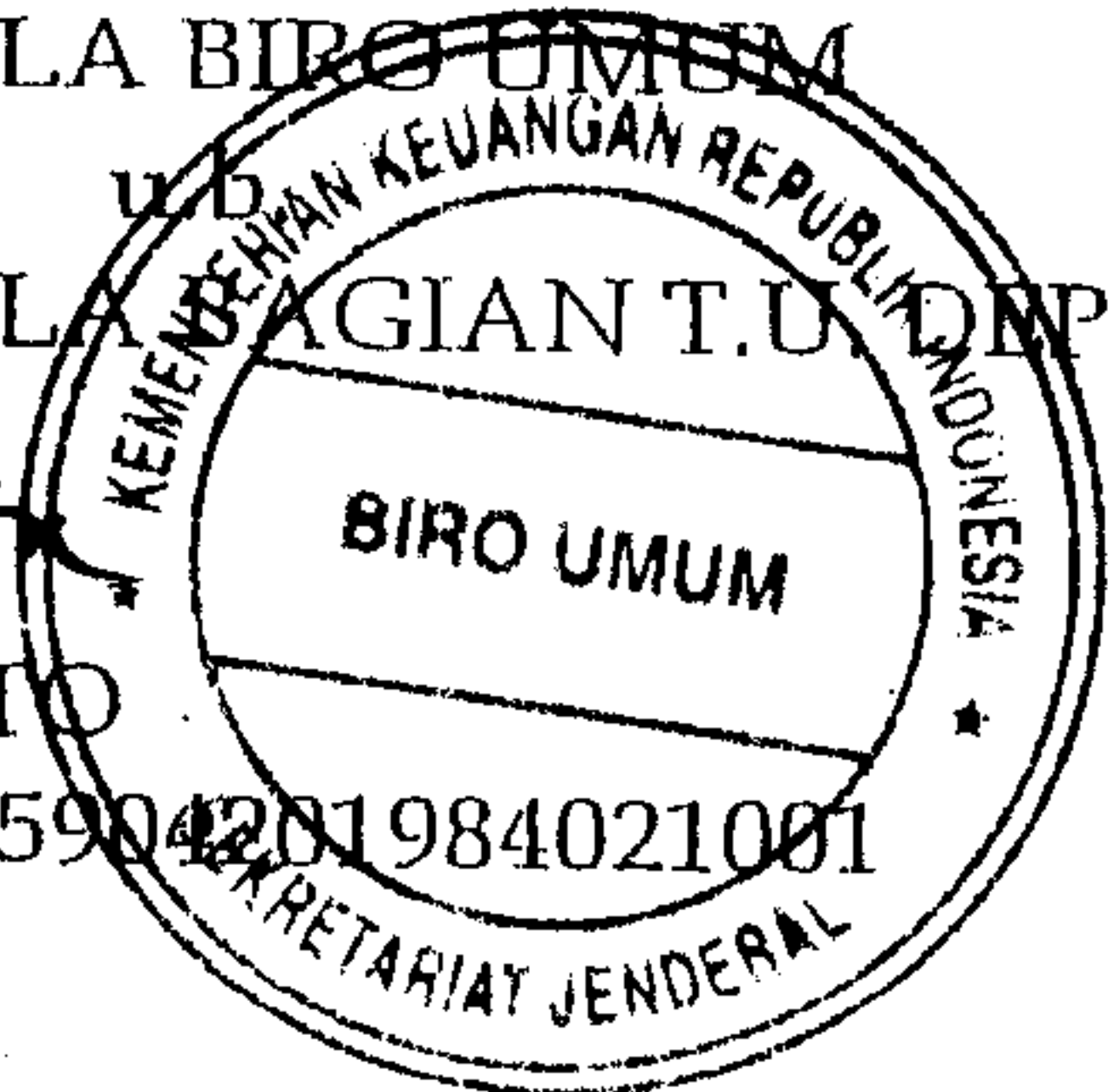
Nama

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JENIS BELANJA	RUPIAH	TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
dst...					
Total					

Keterangan :
 Kolom 2 : diisikan program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011.
 Kolom 3 : diisikan kegiatan yang direncanakan.
 Kolom 4 : diisikan dengan belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan keuangan, atau belanja hibah.
 Kolom 5 : diisikan jumlah rupiah dari masing-masing belanja.
 Kolom 6 : diisikan target dan indikator capaian program yang terkait dengan kegiatan, misal : persentase APK, persentase ruang kelas yang memenuhi standar, dsb.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN



GIARTO
 NIP195901201984021001

MENTERI KEUANGAN,
 ttd,
 AGUS D.W. MARTOWARDOJO